

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sekarang ini pembangunan di berbagai bidang sedang giat dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sejalan dengan kepesatan pembangunan fisik tersebut, maka mulai berdiri pula perusahaan- perusahaan yang bekerja sebagai pelaksana maupun perencana dan pengawas, baik untuk pembangunan gedung, jalan maupun irigasi. Hal ini dilatarbelakangi harapan untuk mendapatkan pekerjaan dan keuntungan yang besar.

Keterlambatan proyek konstruksi bisa saja disebabkan salah dalam melakukan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dalam tahap perencanaan, atau bermacam-macam kemungkinan. Misalnya disebabkan manajemen yang tidak tepat, masalah bahan material, tenaga kerja, peralatan, keuangan, cuaca, waktu pelaksanaan yang singkat atau tidak tepat dan lain sebagainya sehingga terhambatnya pelaksanaan proyek dan secara pasti mengakibatkan keterlambatan dalam penyelesaian proyek.

Keterlambatan proyek bagi kontraktor akan mengalami kerugian waktu dan biaya. Bagi *Owner*, keterlambatan penyelesaian pekerjaan proyek akan menyebabkan kerugian terhadap waktu hasil proyek, sehingga penggunaan hasil pembangunan proyek menjadi mundur atau terlambat.

Dalam pelaksanaan proyek konstruksi yang tepat waktu, dapat dipastikan menguntungkan kedua belah pihak. Dalam hal inilah peran Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi terjadinya keterlambatan proyek pekerjaan konstruksi.

## 1.2 Perumusan Masalah

Dalam sebuah kegiatan konstruksi dihadapkan pada berbagai permasalahan dan seringkali tidak luput dari permasalahan tersebut. Adapun salah satu permasalahan yang sering timbul adalah ketelambatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Banyak faktor yang menyebabkan keterlambatan pekerjaan pada suatu proyek konstruksi. Hal inilah yang akan dibahas pada kesempatan ini dan bagaimana solusi untuk mengatasinya.

Adapun permasalahan yang akan dibahas berdasarkan uraian di atas adalah sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KEINSINYURAN.

- Setiap Insinyur yang akan melakukan Praktik Keinsinyuran di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI)
- Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh PII. Setelah lulus Uji Kompetensi yang dilakukan oleh LSP Lembaga Sertifikasi Pemerintah

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tantangan Insinyur :

1. Kemajuan Inovasi Digital yang Masif terhadap Kepropesian
2. Perubahan Iklim
3. Transisi Energi (Green Lite)

## 1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah yang menjadi ruang lingkup pembahasan pada tugas Laporan Teknik ini adalah :

Etika Dalam Praktek Ke Insinyuran.

1. Mengutamakan keluhuran budi.
2. Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia.
3. Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran

## **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat dari penulisan Laporan Teknik ini adalah untuk mengantisipasi permasalahan yang sering timbul pada proyek pekerjaan konstruksi. Khususnya permasalahan keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan, sehingga diperoleh strategi yang dapat digunakan untuk menanggulangi dan meminimalisir terjadinya keterlambatan pekerjaan pada pelaksanaan proyek konstruksi yang akan datang.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dari laporan teknik ini terdiri dari 5 Bab adalah sebagai berikut:

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penulisan, batasan masalah, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

### **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II berisi mengenai tinjauan pustaka, yang akan menjelaskan tentang landasan teori mengenai pengertian keterlambatan proyek, dampak dari keterlambatan proyek, faktor penyebab keterlambatan proyek dan mengatasi keterlambatan.

### **3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab III berisi mengenai pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data tersebut.

### **4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab IV berisi mengenai tahapan kerja pengawasan, konsep dasar dalam pengawasan, tenaga yang diperlukan, aspek dasar jasa pelayanan konsultan pengawas, pengawasan konstruksi, Peran Konsultan Pengawas Dalam Mengantisipasi Keterlambatan Pekerjaan Pada Proyek Gedung Balai Kota (Merah Putih) Kota Bengkulu, progres pekerjaan dan kendala serta penanganannya.